



Cegah Akses Pelanggar Satu Pintu Masuk

■ Pemkot Minta Pengusaha Oleh-Oleh Awasi Rombongan Bus Wisatawan Nakal

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mendorong pengusaha toko oleh-oleh di wilayahnya, supaya ikut serta berperan aktif mengawasi akses wisatawan, khususnya di masa PPKM Level 3. Para pengusaha ini diminta untuk tidak menerima rombongan yang belum masuk Terminal Giwangari.

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, mengatakan skema *one gate system* tetap jadi andalan Pemkot, dalam menyaring para pelancong yang masuk. Tapi, seiring angka kunjungan yang terus melonjak, pemerintah pun butuh sinergi dari pelaku wisata.

"Selain testing (Covid-19) acak di tempat wisata, kami juga berharap teman-teman hotel, maupun toko oleh-oleh, bisa menjadi pelapisnya. Kita sedang koordinasikan itu, supaya mereka tidak menerima bus-bus yang belum masuk ke (Terminal) Giwangari," katanya, Kamis (2/12).

Dirinya tidak menampik, dalam beberapa pekan terakhir, masih dijumpai deretan angkutan pariwisata, yang enggan mematuhi aturan satu pintu masuk. Menurutnya, opsi itu dipilih, karena rombongan yang mereka bawong, tidak memenuhi syarat-syarat perjalanan luar daerah.

"Karena tidak melalui Giwangari, mereka akhirnya tidak mendapat akses ke TKP resmi. Jadi, rombongan dibawa ke toko oleh-oleh, diturunkan di sana. Kemarin masih ada itu, tapi sudah dikondisikan teman-teman Kemantren. Kita harapannya jangan terjadi lagi begitu," katanya.

Wakil Wali Kota Yogyakarta tersebut menegaskan, butuh komitmen dari para pemilik toko oleh-oleh agar wisatawan yang tidak memenuhi syarat, khususnya soal vaksin virus corona, benar-benar tidak diberi celah. Dengan begitu, pelancong yang tiba, dipastikan telah tervakasi.

"Ya, selama ini toko oleh-oleh, selain itu nggak ada lah. Biasanya toko oleh-oleh, atau modus lainnya, bus-bus itu menurunkan penumpang di Maloloboro, kemudian nanti dijemput lagi, jadi tidak parkir," urai Heroe.

Ia menandakan, peningkatan wisatawan selama Nataru mendatang harus diantisipasi sebaik mungkin, meski pusat telah menerapkan berbagai macam pembatasan. Ancaman

BUTUH KOMITMEN

- Pemkot minta pengusaha toko oleh-oleh jangan terima rombongan pelanggar satu pintu masuk.
- Pemkot minta pengusaha benar-benar menjaga komitmen.
- Hal ini untuk mencegah penularan Covid-19

gelombang tiga pandemi, plus varian terbaru Covid-19, omicron, saat ini tengah mengintai.

"Meskipun sarana, atau fasilitas kesehatan kita sekarang sudah jauh lebih siap, lonjakan kasus Covid-19 tetap harus dicegah. Bagaimanapun wisatawan datang ke Yogyakarta sehat, pulang juga sehat," jelasnya.

Larangan cuti

Sementara itu, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemda DIY untuk cuti dan melaksanakan perjalanan ke luar daerah atau mudik selama Nataru. Hal ini mengacu Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 26/2021, ASN dilarang cuti dan bepergian sejak 24 Desember 2021 hingga 4 Januari 2022.

Kebijakan tersebut juga menjadi salah satu upaya untuk membatasi mobilitas warga di musim libur akhir tahun. Para pejabat maupun kepala daerah di DIY pun juga dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri.

"Saya kira untuk Nataru nggak bisa (mudik dan cuti) karena (aturan) itu tetap berlaku. Kami pun tidak boleh ke luar negeri kalau keluar provinsi aja harus izin," terang Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, kemarin.

Jika ditemui pelanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Sanksi mengacu dari SE yang diterbitkan pemerintah pusat. "Sanksinya kan berproses, (misalnya) peringatan. Tergantung kepentingannya apa," beber Sultan.

Kemudian untuk pengawasannya akan diserahkan kepada masing-masing kepala Organisasi Kepala Daerah (OPD). Pimpinan OPD perlu memastikan bahwa seluruh ASN telah mengisi presensi sepanjang masa pelarangan cuti dan perjalanan.

"Masak ASN (jumlahnya) seribu diikuti ke mana-mana. Jadi tanggung jawab kepala dinas kan setiap hari harus absensi, gitu saja," terang Sultan. (akatro)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005